

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap individu yang dilahirkan di muka bumi secara inheren memiliki hak atas kebebasan yang dijamin sepenuhnya sebagai bagian dari kodrat manusia. Jaminan kemerdekaan tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk hak dasar dan kebebasan fundamental yang bersifat inheren pada setiap individu, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, ras, agama, status sosial, maupun kondisi lainnya. Kemerdekaan ini merupakan prinsip universal yang tidak dapat diingkari dan harus dilindungi sebagai bagian tak terpisahkan dari martabat dan kehormatan manusia. Dengan demikian, menjadi kewajiban negara untuk memastikan realisasi hak-hak dasar warga negaranya sebagai janji bagi negara dan komunitas internasional (Pramesti & Nugraheni, 2024). Akan tetapi, munculnya masalah pembangunan telah menjadi salah satu isu sosial yang signifikan selama ini. Isu ini menarik perhatian berbagai kalangan, baik dari segi teoretis maupun praktis (Sabrina, 2022). Dalam konteks teoretis, diskusi mengenai pembangunan makin berkembang seiring dengan munculnya fokus baru di dunia yaitu pembangunan berkelanjutan. Di sisi praktis, isu-isu pembangunan makin banyak dibahas, terutama dengan munculnya tantangan-tantangan yang mengancam pembangunan, stabilitas, dan keberlangsungan hidup masyarakat global seperti kelaparan, pendidikan tidak merata, pengangguran, kesenjangan sosial, populasi lingkungan, serta isu-isu kritis lainnya, termasuk kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi, baik pada skala nasional maupun regional. Studi terbaru mengindikasikan adanya disparitas yang nyata antara angka kemiskinan Indonesia secara agregat dengan kondisi di wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Karawang (BPS, 2024). Data tersebut seperti terlihat dalam grafik di bawah

ini, tidak hanya menggambarkan variasi tingkat kemiskinan antardaerah, tetapi juga menjadi landasan empiris untuk mengkaji determinan struktural yang memengaruhinya, termasuk dampak residual pandemi COVID-19, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, serta layanan kesehatan yang belum optimal (Pramaria & Nagathata, 2024; Safetan, 2022).



**Gambar 1.1 Diagram Garis Kemiskinan (GK) Indonesia, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2024**

*Sumber: (BPS, 2025a; BPS, 2025b; BPS, 2024)*

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Gambar 1.1, Garis Kemiskinan (GK) di Indonesia per September 2024 mencapai nilai Rp595.242,00 /kapita/bulan (BPS, 2025a), Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Jawa Barat pada September 2024 tercatat sebesar Rp535.509/kapita/bulan (BPS, 2025b), sedangkan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Karawang pada Maret 2024 sebesar Rp597.345/kapita/bulan (BPS, 2024). Dengan demikian, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase garis kemiskinan di pusat dan daerah masih cukup tinggi, terdapat ribuan orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai determinan termasuk kesenjangan pembangunan, keterbatasan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta dampak krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, turut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi tersebut hingga menciptakan kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Konsep pembangunan dengan karakteristik heterogen telah berkembang secara komprehensif namun, keseluruhannya memiliki orientasi penyelesaian terhadap problematika eksisting. Salah satu formulasi konseptual yang telah diimplementasikan secara global ialah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sidauruk, 2018). Dalam konteks ini, SDGs diharapkan menjadi solusi tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, tetapi juga untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan aspek sosial (Sabrina, 2022). SDGs merupakan bentuk penyempurnaan sekaligus kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) sebagaimana tertuang dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Sidang tersebut menghasilkan kesepakatan dan komitmen dari 169 negara untuk mengimplementasikan target SDGs berdasarkan prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan menjamin tercapainya pembangunan yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat tanpa ada satu pun yang terabaikan. Kesepakatan ini menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan global yang berkelanjutan. Kesepakatan tersebut kemudian dirumuskan dalam visi dan misi SDGs dirumuskan dalam 17 tujuan dan 169 target yang menekankan pada empat dimensi utama pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan hukum dan tata kelola, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 (Bappenas, 2023).



**Gambar 1.2 17 TPB/SDGs**

*Sumber: (Bappenas, 2021)*

**Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Target yang Harus Diutamakan Dalam RPJMN 2020-2024 Berdasarkan Pilar TPB/SDGs**

Pilar/Tujuan	Jumlah Target Global	Jumlah Target TPB/SDGs Yang Telah Diurusutamakan	
		RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
<b>Pilar Pembangunan Sosial</b> (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5)	47	25	38
<b>Pilar Pembangunan Ekonomi</b> (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17)	54	30	37
<b>Pilar Pembangunan Lingkungan</b> (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15)	56	31	38
<b>Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola</b> (Tujuan 16)	12	8	11
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>94</b>	<b>124</b>

*Sumber: (Bappenas, 2021)*

Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang menyetujui dan berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs, telah mengimplementasikan SDGs melalui instrumen hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi tersebut selanjutnya mengalami revisi menjadi Perpres RI Nomor 111 Tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan implementasi. Peraturan ini menetapkan target nasional untuk pencapaian TPB hingga tahun 2024 dan menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Koordinator Pelaksana Nasional TPB di Indonesia. Tim Koordinasi Nasional (TKN) untuk pencapaian SDGs terdiri atas berbagai

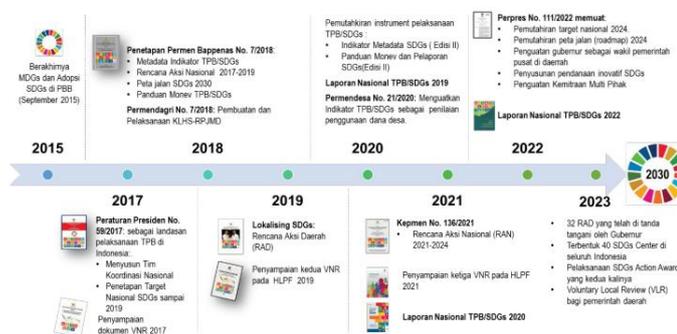
Euis Dwi Sartika, 2025

**PENGARUH CIVIC ENGAGEMENT TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 2, 4, 8, DAN 12 PADA PETANI PADI DI DUSUN CIWELUT, DESA PANYINGKIRAN, KECAMATAN RAWAMERTA, KABUPATEN KARAWANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemangku kepentingan yang diklasifikasikan ke dalam empat platform utama, yaitu: (1) Pemerintah dan lembaga legislatif, (2) Organisasi masyarakat dan media, (3) Pelaku filantropi dan dunia usaha, serta (4) Kalangan akademisi dan pakar (Bappenas, 2023).

Tahun 2025 menandai tersisanya waktu 5 tahun menuju 2030 untuk pelaksanaan SDGs. Periode tersisa ini merupakan momentum krusial bagi percepatan implementasi program-program pembangunan berkelanjutan sesuai target yang telah ditetapkan pada komitmen global. Dalam proses implementasinya, Bappenas secara konsisten mendorong *multistakeholders* untuk berkolaborasi aktif dalam mewujudkan SDGs sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing. Antara tahun 2017 dan 2023 telah disusun 32 Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditandatangani oleh para Gubernur, serta terbentuk sekitar 40 SDGs *Center/Hub/Lab/Network* di seluruh Indonesia. Selain itu, telah diadakan SDGs *Annual Conference* (SAC) sebanyak 6 kali dan SDGs *Action Award* (SAA) 2 kali pada tahun 2022 dan 2023. Bappenas juga mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan pencapaian SDGs melalui *Voluntary Local Review* (VLR) di PBB (Bappenas, 2023). Secara keseluruhan, perkembangan SDGs hingga tahun 2023 dapat dilihat melalui laporan pelaksanaan pencapaian TPB 2023 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2023 sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.3 di bawah ini.



**Gambar 1.3 Lini Masa SDGs Indonesia**

*Sumber: (Bappenas, 2023)*

Euis Dwi Sartika, 2025

**PENGARUH CIVIC ENGAGEMENT TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 2, 4, 8, DAN 12 PADA PETANI PADI DI DUSUN CIWELUT, DESA PANYINGKIRAN, KECAMATAN RAWAMERTA, KABUPATEN KARAWANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sehubungan dengan ini, dapat dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan di daerah juga ditentukan oleh keterlibatan warga negara (*civic engagement*). *Civic engagement* terbentuk melalui kesadaran kognitif dan partisipasi aktif warga negara secara *volunteer*. Kesadaran ini termanifestasi ketika aktor-aktor masyarakat secara otonom terlibat dalam penyelesaian problematika sosial di lingkungannya tanpa adanya koersi eksternal, sehingga tindakan tersebut didorong oleh keinginan pribadi. Penting untuk memberikan dukungan yang dapat mendorong setiap individu maupun kelompok untuk berpartisipasi. Secara konseptual, *civic engagement* dapat didefinisikan sebagai partisipasi individu dalam berbagai aktivitas kolektif yang secara langsung atau tidak langsung mendukung terwujudnya suatu tujuan sosial tertentu (Gultom et al., 2024). Pencapaian tujuan tersebut memerlukan kesadaran dari setiap individu agar partisipasi yang diberikan dapat selaras dengan kebutuhan bersama dan hasil yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan penguatan yang mampu menumbuhkan kesadaran warga negara guna terlibat secara aktif, termasuk dalam proses pembangunan.

*Civic engagement* merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan SDGs. Dalam konteks ini warga negara ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran sentral dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau program pembangunan (UNESCO, 2015). Hal ini menjadi semakin penting agar pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan warga negara. Keterlibatan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup aspek mental, moral, atau emosional individu dalam suatu kelompok yang mendorong partisipasi aktif serta rasa tanggung jawab terhadap upaya yang dilakukan oleh organisasi (Makhmudi & Mukhtali, 2018). Dengan kata lain, keterlibatan tidak hanya terbatas pada keikutsertaan secara fisik dalam pekerjaan, melainkan juga mencerminkan komitmen personal yang mendorong kontribusi dan tanggung jawab yang bermakna.

Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep kewarganegaraan yang tidak lagi terbatas pada definisi klasik menurut T.H. Marshall yang mencakup dimensi sipil, politik, dan sosial (Abowitz & Harnish, 2006) atau aspek hukum, politik, dan sosial (Iija, 2011). Konsep tersebut telah mengalami perluasan dengan memasukkan dimensi lain seperti sosial, ekonomi, dan politik (MacGregor, 2005), budaya (Rosaldo, 1994), serta lingkungan (Jagers & Martisson, 2010). Selain itu, *civic engagement* juga dapat diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat, aksi kolektif, partisipasi politik, dan upaya perubahan sosial (Mawarti, 2023). *Civic engagement* merupakan konsep penting dalam kehidupan publik yang menekankan partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial (Syarifullah, 2015; Fahlevi & Kuncoro, 2021). Beberapa aspek yang sangat terkait dengan konsep ini adalah masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bentuk pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan yang mencakup struktur kelembagaan maupun non-kelembagaan. Pendidikan ini bertujuan membentuk *civic competence* dimana warga negara mampu menginternalisasi hak dan kewajiban legal-sosialnya dalam multidimensi kehidupan, baik pada ranah intra maupun ekstrakurikuler. Namun, minimnya literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) di kalangan masyarakat pada konteks non-formal menyebabkan terbatasnya aplikasi nilai-nilai PPKn secara spasial hanya pada lingkungan institusi pendidikan. (Gultom et al., 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan PPKn di lingkungan masyarakat menjadi hal yang krusial untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan warga negara yang berlandaskan pada karakter serta tanggung jawab sosial, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam tiga ranah kehidupan kolektif: masyarakat (sosial), bangsa (nasional), dan negara (politik).

Secara epistemologi, PPKn memuat trilogi kompetensi kewarganegaraan yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) pengetahuan kewarganegaraan, (2) keterampilan kewarganegaraan, dan (3) sikap kewarganegaraan. Dalam konteks pengembangan kesadaran ekologis, mekanisme pembentukannya diawali dengan internalisasi pengetahuan dasar (*cognitive domain*) yang selanjutnya ditransformasikan menjadi aksi konkret melalui penguasaan kompetensi (*psychomotor domain*). Interaksi dinamis antara aspek kognitif dan psikomotorik ini akan mengkristalisasi karakter (*affective domain*) yang pada tahap akhir akan terinstitusionalisasi sebagai pola sikap berkelanjutan (*habitual disposition*) (Gultom et al., 2024). PPKn memiliki signifikansi krusial dalam kerangka SDGs, khususnya melalui fungsinya sebagai medium transformasi nilai-nilai kebangsaan. Secara operasional, PPKn berperan sebagai *agent of character building* melalui internalisasi sistem nilai yang mencakup: 1) Dimensi moral-filosofis; 2) Prinsip etika universal; dan 3) Konstruksi sikap prososial (toleransi, kolaborasi, dan keadilan distributif). Proses pedagogis ini bersifat fundamental dalam menciptakan: 1) *Social capital* berupa harmoni sosial; 2) Kohesivitas Masyarakat; dan 3) *Civic virtue* sebagai landasan SDGs.

PPKn berfungsi sebagai instrumen pedagogis untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang meliputi kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik pada lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, PPKn memfasilitasi internalisasi pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban konstitusional warga negara, sekaligus mengembangkan literasi politik (*political literacy*) yang esensial bagi partisipasi dalam proses demokrasi. Lebih lanjut, kurikulum PPKn mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan hak asasi manusia sebagai kerangka normatif untuk membentuk generasi muda yang mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab (*responsible citizenship*) dalam sistem politik. Aspek PPKn ini memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas sosio-politik yang menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan (Gultom et al., 2024).

Secara paralel, PPKn berfungsi sebagai medium untuk menumbuhkan kesadaran nasional (*national consciousness*) dan semangat patriotik di kalangan generasi muda. Kesadaran kebangsaan ini kemudian terinternalisasi sebagai motivasi intrinsik bagi individu untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat (*community development*) dan negara bangsa (*nation-state*), sekaligus memperkuat integrasi nasional sebagai fondasi keutuhan bangsa.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs. Meskipun berbagai studi tersebut memberikan wawasan yang berharga, masih terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu, peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan menjadi penting guna mengidentifikasi kontribusi yang telah ada serta tantangan yang masih dihadapi dalam bidang ini. Penelitian dengan judul “Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program *Go Green*”, mengkaji tentang *civic engagement* dalam suatu pembangunan sangat memberikan kontribusi terhadap tercapainya suatu tujuan tertentu (Wadu et al., 2020). *Civic engagement* dalam SDGs tentu tidak dapat dipisahkan dari tiga komponen utama kompetensi PPKn yakni pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan.

Penelitian lain yang berjudul “*The Role of Citizen Engagement in Achieving Sustainable Development Goals at the Local Level*”, mengungkapkan bahwa *civic engagement* dalam program pembangunan dapat meningkatkan efektivitas implementasi SDGs pada tingkat subnasional. Penelitian ini mengungkapkan bahwa *civic engagement* tidak sekadar meningkatkan kesadaran akan isu-isu pembangunan, tetapi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (, 146). Penelitian lainnya dengan judul “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kedah”, menekankan pada *civic engagement* dalam pencapaian SDGs memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa proses pembangunan sejalan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan

kualitas hidup mereka secara berkelanjutan (Setiawan et al., 2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam memahami pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs yang memfokuskan pada 4 tujuan berkelanjutan yaitu 2 (Tanpa Kelaparan), 4 (Pendidikan Berkualitas), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Dusun Ciwelut terletak di wilayah dataran rendah yang menjadi bagian dari Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu daerah pertanian padi terbesar di Indonesia. Mayoritas penduduk Dusun Ciwelut bekerja sebagai petani, mengingat wilayah Karawang secara umum merupakan salah satu lumbung padi nasional. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara *civic engagement* dan SDGs yang menyoroti peran keterlibatan masyarakat dalam konteks perkotaan (Smith, 2020), penelitian ini berfokus pada konteks pedesaan yang seringkali terabaikan.

Salah satu kebaruan utama dalam penelitian ini terletak pada penekanan terhadap interaksi antar SDGs yang saling terkait. Penelitian dengan judul “*Civic Education and Community Participation: A Pathway to Sustainable Development Goals*”, menunjukkan bahwa PPKn dapat meningkatkan *civic engagement* (Johnson & Lee, 2019), tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana keterlibatan tersebut berdampak pada pencapaian SDGs yang berbeda secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana keterlibatan petani dalam kegiatan komunitas dapat mempengaruhi pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12 secara holistik.

Fokus 4 tujuan tersebut saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain, “Tanpa Kelaparan” meningkatkan kapasitas individu untuk terlibat dalam pembelajaran dan pekerjaan sehingga memfasilitasi “Pendidikan

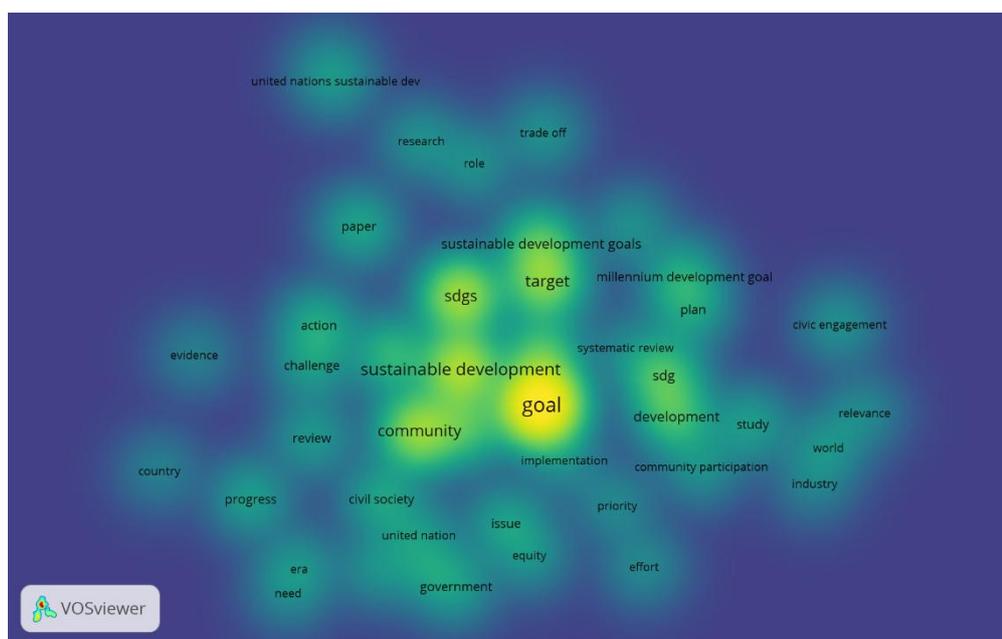
Berkualitas.” “Pendidikan Berkualitas” membekali individu dengan kompetensi penting yang diperlukan untuk pekerjaan yang menguntungkan sehingga berkontribusi pada “Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.” “Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” mempromosikan praktik “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” dengan meningkatkan kesadaran dan memungkinkan pilihan berdasarkan informasi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” mempengaruhi ketersediaan sumber daya esensial untuk praktik pertanian berkelanjutan yang pada gilirannya memperkuat upaya yang bertujuan untuk mencapai “Tanpa Kelaparan.” Pendekatan integratif ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu secara menyeluruh, tetapi juga mendorong terbentuknya kerangka sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket untuk mengukur tingkat keterlibatan petani padi dalam mendukung SDGs secara lebih sistematis dan terukur, berbeda dengan pendekatan kualitatif pada penelitian sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif dan terbatas pada pemahaman mendalam dari segi naratif. Penggunaan angket memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara efisien dari responden, sehingga hasil penelitian ini dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan antarvariabel seperti faktor-faktor dan dampak yang memengaruhi keterlibatan petani dalam program berkelanjutan. Pendekatan kuantitatif memungkinkan generalisasi temuan terhadap populasi yang lebih luas, sehingga memberikan dasar empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi temuan kualitatif sebelumnya, tetapi juga menyajikan bukti numerik yang mendukung serta dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan strategi peningkatan *civic engagement* pada petani padi dalam mencapai SDGs 2, 4, 8, dan 12.





gelap maka, topik riset tersebut kurang diteliti. Gambar 1.6 menunjukkan riset dengan topik *goal*, *sustainable development goals*, *community*, SDGs, dan target sering diteliti. Di sisi lain, seperti *civic engagement*, *civil society*, *community participation*, *study*, masih sedikit diteliti.



**Gambar 1.6 Density Visualization dalam Kata Kunci Civic Engagement dan SDGs**

*Sumber: (Dokumen Pribadi Peneliti Menggunakan Aplikasi VOSviewer, 2025)*

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun kesadaran mengenai pentingnya *civic engagement* untuk mencapai SDGs telah terbentuk, masih ditemukan keterbatasan penelitian yang mengaitkan *civic engagement* dengan pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada komunitas petani padi di wilayah pedesaan, khususnya seperti yang terdapat di Dusun Ciwelut Karawang. Kesenjangan penelitian ini mengindikasikan perlunya studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara keterlibatan warga dengan implementasi target pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian pedesaan. Lebih lanjut, analisis *VOSviewer* juga menunjukkan bahwa terdapat penelitian yang hanya membahas SDGs 4 dan 8 tanpa mempertimbangkan bagaimana pencapaian

SDGs 2 dan 12 dapat saling memengaruhi dalam konteks *civic engagement* (Smith, 2020; Johnson & Lee, 2019). Penelitian yang ada cenderung terfokus pada SDGs tertentu dengan jumlah terbatas yang mengeksplorasi interaksi antara berbagai SDGs.

*Civic engagement* menjadi konsep krusial yang memposisikan petani sebagai subjek aktif pada proses pembangunan, tidak hanya sekedar objek. Pendekatan partisipatif ini memberikan ruang bagi petani untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, serta pelaksanaan program pembangunan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Melalui keterlibatan warga yang bermakna, tercipta ekosistem pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil komunitas petani. PPKn berperan dalam membentuk karakter dan kesadaran petani, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan. Dengan memperkuat *civic engagement*, petani tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian SDGs seperti pengentasan kelaparan, pendidikan berkualitas, dan praktik pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi kewargaan di kalangan petani menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi mereka turut diperhitungkan dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang masih belum terjangkau oleh studi sebelumnya dengan mengeksplorasi bagaimana pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut Karawang. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi dan dampak positif dan negatif dari pengaruh tersebut dengan mengambil judul penelitian: **Pengaruh *Civic Engagement* Terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2, 4, 8, dan 12 Pada Petani Padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. bagaimana pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang?
2. bagaimana faktor yang memengaruhi *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang?
3. apa dampak positif dan negatif dari pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis bagaimana pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. untuk menganalisis pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
2. untuk menganalisis faktor yang memengaruhi *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang; dan
3. untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi di Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Dalam mencapai SDGs, *civic engagement* menjadi elemen krusial, terutama di komunitas pertanian seperti petani padi di Dusun Ciwelut Karawang. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan sosial. Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif teoretis yang saling melengkapi. *Pertama*, Teori Pembangunan Michael Todaro menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan. *Kedua*, Teori Modal Sosial Robert D. Putnam menjelaskan mekanisme sosial yang memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi masyarakat. *Ketiga*, Teori Kewarganegaraan Republikan menawarkan pandangan tentang tanggung jawab moral warga dalam pembangunan bersama. Kombinasi ketiga teori ini tidak hanya memperkaya analisis akademis tentang keterkaitan *civic engagement* dengan SDGs, tetapi juga memberikan dasar konseptual untuk merancang intervensi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peneliti, masyarakat, dan pengembangan studi lebih lanjut, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti: Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya *civic engagement* dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran PPKn di kelas. Peneliti dapat menggunakan temuan dari skripsi ini untuk merancang materi ajar yang relevan, mengintegrasikan isu-isu lokal dan global terkait

SDGs ke dalam kurikulum, serta mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di komunitas mereka. Selain itu, peneliti juga dapat berperan sebagai fasilitator yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan generasi yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berdampak positif dalam pembentukan karakter serta kesadaran kewarganegaraan peserta didik.

- b. Bagi Petani: Manfaat penelitian ini bagi petani padi di Dusun Ciwelut Karawang adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa (*civic engagement*) sebagai faktor penunjang pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12. Melalui hasil penelitian ini, petani dapat menyadari bahwa partisipasi mereka dalam musyawarah desa, kelompok tani, pelatihan, serta kegiatan kolektif lainnya tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan, tetapi juga memperkuat modal sosial, akses terhadap pendidikan, serta mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kesadaran kritis petani terhadap peran strategis mereka dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
- c. Bagi Generasi Muda: Munculnya konsep *petani milenial*, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk melihat sektor pertanian bukan hanya sebagai pekerjaan tradisional, tetapi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan aktif, inovasi, dan kolaborasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam civic

engagement seperti organisasi kepemudaan, kelompok tani muda, atau kegiatan sosial berbasis desa dapat mempercepat pencapaian SDGs di bidang pangan, pendidikan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berperan sebagai agen perubahan dalam transformasi pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mempertegas pentingnya peningkatan kapasitas, literasi sosial, dan kepemimpinan pemuda desa dalam merespons tantangan dan peluang di sektor pertanian masa kini dan masa depan.

- d. Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan kajian kewarganegaraan yang kontekstual dan aplikatif, khususnya terkait dengan peran *civic engagement* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan ajar, referensi akademik, serta landasan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, partisipasi warga negara, dan tujuan pembangunan global (SDGs) ke dalam praktik PPKn. Selain itu, penelitian ini memperluas ruang lingkup PPKn sebagai ilmu yang tidak hanya berkuat pada aspek normatif dan yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi praksis dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan visi PPKn dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan.
- e. Bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Penelitian ini memberikan masukan strategis dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan pertanian yang berbasis partisipasi masyarakat, khususnya petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *civic engagement* petani memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12. Informasi ini

dapat dimanfaatkan oleh dinas untuk merancang program yang tidak hanya berorientasi pada bantuan teknis atau fisik, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif petani dalam proses perencanaan, pelatihan, dan pengawasan program. Selain itu, hasil ini juga dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, petani, dan generasi muda dalam menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh *civic engagement* terhadap SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada petani padi Dusun Ciwelut, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Objek dalam penelitian ini yaitu *civic engagement* sebagai variabel independen dan SDGs 2, 4, 8, dan 12 sebagai variabel dependen. Subjek penelitian meliputi petani padi berusia 16-65 tahun yang tinggal dan bekerja di Dusun Ciwelut Karawang. Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang ilmu sosial-masyarakat dengan fokus pada *civic engagement* dalam proses pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *civic engagement* dalam aktivitas masyarakat dapat memengaruhi pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi *civic engagement*, serta dampak positif dan negatif dari *civic engagement* terhadap pencapaian keempat SDGs tersebut. Dengan menggunakan pendekatan metodologis berbasis kuantitatif melalui penyebaran angket, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara *civic engagement* dan SDGs dari perspektif petani, serta kontribusi mereka dalam proses pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik di bidang pertanian dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan.